

**PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN ASN UNTUK Mendukung
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL**

Hadiwiyono¹, Taufiq Soeltanto², C. Evie Dewantara³,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Email: hadiwiy59@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kapasitas pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel melalui pengembangan etos kerja yang tinggi, integritas, serta kemampuan melayani masyarakat dengan optimal. Dalam kerangka ini, peningkatan kapasitas ASN mencakup pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan layanan publik. Melalui strategi seperti penataan organisasi, sistem seleksi dan promosi berbasis merit, serta pengembangan SDM yang berkelanjutan, program reformasi birokrasi berusaha membentuk ASN yang berintegritas dan bebas dari intervensi politik. Upaya ini melibatkan audit organisasi, pemetaan kompetensi, pelatihan, dan redistribusi SDM sebagai pendekatan integral untuk mengatasi tantangan pelayanan publik. Selain itu, penerapan kebijakan yang mendukung netralitas, evaluasi kinerja, serta pemberdayaan ASN dengan keterampilan teknis dan etika yang sesuai merupakan langkah penting dalam mencapai standar pelayanan publik yang unggul. Maka untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas ASN Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar telah mengadakan Bimbingan Teknik (BIImtek) selama 3 hari (11-13 Oktober 2024) di hotel Agrowisata Kota Batu.

Kata Kunci: ASN, pelayanan birokrasi, reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, profesionalisme, etika kerja

ABSTRACT

The enhancement of Civil Servants' (ASN) service capacity is a key element in supporting the success of national bureaucratic reform. This reform aims to create a more professional, transparent, and accountable bureaucracy by developing a high work ethic, integrity, and the ability to serve the community optimally. In this context, enhancing ASN capacity includes mapping qualifications, competencies, and performance, enabling the government to align human resources with public service needs. Through strategies such as organizational restructuring, merit-based selection and promotion systems, and sustainable human resource development, the bureaucratic reform program strives to establish ASN with integrity and free from political interference. This effort involves organizational audits, competency mapping, training, and human resource redistribution as an integrated approach to addressing public service challenges. Furthermore, the implementation of policies that support neutrality, performance evaluation, and the empowerment of ASN with appropriate technical skills and ethics are essential steps in achieving high standards of public service. With a roadmap for enhancing ASN service capacity, it is hoped that bureaucratic reform can be more effective in achieving government strategic goals, including improving community welfare through responsive, clean, and dignified services.

Keywords: ASN, bureaucratic service, bureaucratic reform, capacity building, professionalism, work ethics

Keywords: Electronic Medical Records, Optimization, Healthcare Services, Efficiency, Puskesmas Tajinan

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan akuntabel semakin meningkat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari birokrasi memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Upaya peningkatan kapasitas ASN menjadi fokus penting dalam reformasi birokrasi nasional yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan. Reformasi ini menitikberatkan pada pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN serta penerapan prinsip-prinsip netralitas dan profesionalisme dalam pelayanan. Meskipun berbagai kebijakan reformasi telah diterapkan, masih terdapat tantangan di lapangan, seperti distribusi tenaga kerja yang belum merata, keterbatasan kapasitas di daerah, dan resistensi terhadap perubahan budaya kerja. Langkah-langkah strategis seperti audit organisasi, pelatihan, dan redistribusi sumber daya manusia menjadi pendekatan penting untuk menghadapi tantangan ini. Program peningkatan kapasitas ASN juga perlu didukung oleh evaluasi berkala yang dapat menilai dampak dari pelatihan serta implementasi kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya roadmap pengembangan kapasitas ASN yang jelas, reformasi birokrasi diharapkan dapat berjalan efektif, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

PERMASALAHAN

Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung reformasi birokrasi nasional menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara efektif. Tantangan ini mencakup strategi yang tepat dalam membangun kapasitas ASN yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, terutama melalui penerapan sistem merit yang bertujuan memastikan ASN yang profesional, netral, dan berintegritas. Selain itu, masih terdapat kendala di lapangan, seperti distribusi tenaga kerja yang belum merata, keterbatasan kapasitas di daerah, serta resistensi terhadap perubahan budaya kerja, yang menghambat efektivitas reformasi birokrasi. Maka, penting untuk memahami sejauh mana kebijakan reformasi mampu membentuk ASN yang memenuhi standar pelayanan yang akuntabel dan responsif. ASN Kecamatan Selopuro baru dibentuk/pemekaran kecamatan oleh Pemda Kabupaten Blitar. Organisasi kecamatan Selopuro karena Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok & fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asa dekonsentrasi, berubahnya statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai Perangkat Daerah, dan diangkat oleh BUPATI/WALIKOTA, Maka CAMAT dalam menjalankan tugasnya, disamping tugas yang melekat (ATRIBUTIF) juga ditambah tugas pelimpahan dari BUPATI/WALIKOTA (DELEGATIF). Dalam konteks ini, evaluasi atas dampak program peningkatan kapasitas ASN terhadap kualitas pelayanan publik

menjadi sangat relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan birokrasi yang lebih efisien dan transpa

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Untuk mencapai peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dalam mendukung reformasi birokrasi nasional, diperlukan beberapa solusi strategis. Melalui Bimbingan Teknik ASN Kecamatan Selopuro diharapkan akan mampu : Pertama, pengembangan kapasitas ASN harus berbasis kompetensi dan kualifikasi melalui pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan unit kerja, mencakup kompetensi teknis, manajerial, etika kerja, serta penguasaan teknologi informasi. Kedua, penerapan sistem merit secara konsisten sangat diperlukan agar seleksi dan promosi ASN dapat dilakukan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sehingga meningkatkan integritas serta profesionalisme ASN serta mengurangi intervensi politik. Ketiga, penataan dan redistribusi SDM ASN perlu dilakukan dengan memetakan kompetensi ASN dan menempatkan pegawai sesuai kebutuhan dan kualifikasi, sehingga pemerataan kapasitas pelayanan dapat tercapai, termasuk di daerah-daerah yang kekurangan tenaga ahli. Keempat, untuk memastikan integritas, peningkatan netralitas dan akuntabilitas ASN harus menjadi fokus dengan menyusun kode etik, pedoman perilaku yang jelas, dan pengawasan berkala. Kelima, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala atas program peningkatan kapasitas ASN, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam perbaikan program pelatihan dan pengembangan kebijakan terkait.

Adapun target luaran dari solusi tersebut meliputi terwujudnya ASN yang kompeten dan profesional yang dibuktikan melalui sertifikasi atau kualifikasi kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Diharapkan juga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel serta meningkatnya kepuasan masyarakat. Selain itu, ketimpangan kapasitas ASN di daerah diharapkan berkurang melalui distribusi tenaga ASN yang lebih merata, terutama di wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami kekurangan tenaga terampil. Solusi ini juga diharapkan dapat menciptakan ASN yang berintegritas dan netral, terbebas dari pengaruh politik, serta berpegang teguh pada etika profesi. Terakhir, tersusunnya roadmap pengembangan kapasitas ASN yang komprehensif akan menjadi panduan strategis yang terukur untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas ASN di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan solusi dan target ini, reformasi birokrasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan Bimbingan Teknik (Bimtek) interaktif yang bertujuan untuk membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Bimtek ini melibatkan presentasi materi, diskusi kelompok, studi kasus, serta simulasi situasi pelayanan birokrasi yang

diselenggarakan pada tanggal 11-13 oktober 2024 di Hotel Agrowisata Kota batu. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Pengenalan Materi Dasar

Bimbingan Teknis (Bimtek) diawali dengan sesi pembukaan yang mencakup pengenalan terhadap tujuan utama kegiatan, latar belakang pentingnya reformasi birokrasi, serta peran strategis ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional. Dalam tahap ini, narasumber memberikan materi tentang sistem merit, etika dan profesionalisme ASN, serta tantangan pelayanan publik saat ini.



2. Diskusi Kelompok dan Pemetaan Masalah

Selanjutnya, peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai masalah yang mereka hadapi dalam pelayanan sehari-hari, terutama terkait dengan kinerja dan tantangan implementasi reformasi birokrasi. Setiap kelompok memetakan masalah utama dan berbagi pengalaman yang dapat diambil sebagai pembelajaran.

3. Studi Kasus dan Simulasi

Pada tahap ini, narasumber memfasilitasi sesi studi kasus terkait situasi pelayanan publik yang sering terjadi, termasuk kasus yang

memerlukan ketangkasan dalam pengambilan keputusan, netralitas, dan akuntabilitas. Peserta melakukan simulasi dalam menangani situasi tersebut untuk mengasah keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan.

4. Pengembangan Rencana Tindak Lanjut

Setelah sesi studi kasus, peserta dibimbing untuk menyusun rencana tindak lanjut yang bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing. Rencana ini mencakup langkah-langkah praktis yang dapat meningkatkan pelayanan publik serta strategi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dalam tugas sehari-hari.

5. Evaluasi dan Penutup

Sebagai bagian akhir dari Bimtek, dilakukan evaluasi untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dan keterampilan yang dilatih. Evaluasi dilakukan melalui kuis atau tanya jawab untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai. Sesi diakhiri dengan pemberian sertifikat partisipasi kepada peserta sebagai bukti pengembangan kompetensi dalam reformasi pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan pelayanan birokrasi yang efektif dan responsif sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi khususnya para ASN Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Para peserta Bimtek mengalami

peningkatan pemahaman terkait konsep-konsep kunci reformasi birokrasi, seperti sistem merit, netralitas, akuntabilitas, dan profesionalisme ASN. Melalui materi yang disampaikan oleh narasumber, ASN lebih memahami peran strategis mereka dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan efisien dalam melayani masyarakat. Selain itu, diskusi dan studi kasus yang dilakukan memungkinkan ASN mengidentifikasi masalah-masalah umum dalam pelayanan publik serta menyusun solusi konkret yang sesuai dengan kondisi masing-masing unit kerja. Permasalahan seperti keterbatasan kapasitas teknis, distribusi SDM yang tidak merata, dan tantangan menjaga netralitas di lingkungan kerja berhasil dipetakan dan dibahas dengan baik.

Pada sesi simulasi pelayanan publik, peserta dilatih untuk menangani situasi kompleks, seperti pengambilan keputusan cepat dan pengelolaan konflik, sehingga mereka dapat mengasah keterampilan manajerial, komunikasi, dan pengendalian diri yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Di samping itu, peserta semakin memahami pentingnya menjaga etika kerja dan integritas dalam setiap tindakan. Terutama tentang Netralitas birokrasi dalam konteks politik pemilu pilkada di kabupaten blitar. Sebagai langkah tindak lanjut, peserta menyusun rencana implementasi yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing, termasuk penerapan evaluasi kinerja yang transparan, pembentukan mekanisme umpan balik dari masyarakat, serta penguatan

kompetensi teknis dan manajerial melalui pelatihan lanjutan.

Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Bimtek yang interaktif dan praktis efektif dalam meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan publik. Dengan pemahaman lebih dalam mengenai reformasi birokrasi serta keterampilan praktis untuk menghadapinya, ASN lebih siap menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membangun kompetensi ASN khususnya ASN Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang mendukung visi reformasi birokrasi nasional, sehingga diharapkan ASN mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif serta mendorong terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan profesional di berbagai tingkatan pemerintahan, terutama menjaga netralitas Birokrasi dalam Pilkada Kabupaten Blitar.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Peningkatan Kapasitas Pelayanan ASN Khususnya ASN Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Mendukung Reformasi Birokrasi Nasional" telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjalankan tugas pelayanan publik secara efektif dan akuntabel. Kegiatan ini, yang dilaksanakan dalam bentuk bimtek interaktif, mampu meningkatkan

pemahaman ASN tentang prinsip-prinsip reformasi birokrasi, seperti sistem merit, netralitas, akuntabilitas, dan profesionalisme, serta memberikan keterampilan praktis yang relevan untuk menghadapi tantangan di lapangan. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tetapi juga keterampilan dalam menyusun solusi konkret terhadap masalah yang dihadapi dalam lingkungan kerja mereka.

Bimtek ini menyoroti pentingnya peran ASN dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan bebas dari pengaruh politik, melalui pendekatan sistematis seperti audit organisasi, redistribusi tenaga kerja, dan penerapan sistem merit yang konsisten. Dengan keterampilan manajerial, komunikasi, dan etika kerja yang semakin baik, ASN diharapkan mampu menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan responsif. Selain itu, adanya rencana tindak lanjut yang disusun peserta menunjukkan komitmen untuk mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan kapasitas berbasis Bimtek dapat menjadi solusi efektif untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Hasilnya, diharapkan ASN dapat berperan lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, sehingga tercipta birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat dan sesuai dengan visi reformasi birokrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024. Jakarta: KemenPAN-RB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Arifin, Z., & Nuraini, Y. (2019). Penerapan Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 104-115.

Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance melalui Reformasi Birokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suryono, A., & Ratnawati, I. (2021). Strategi Peningkatan Profesionalisme ASN dalam Era Digitalisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10(3), 212-225.

Muluk, K. (2019). Tata Kelola Birokrasi: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien. Bandung: Alfabeta.

Kusuma, D., & Wicaksono, S. (2020). Etika dan Profesionalisme ASN dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Press.



Indonesia Corruption Watch. (2022).
Netralitas ASN dalam Pemilu dan
Tantangan dalam Penerapan
Reformasi Birokrasi. Laporan
Tahunan ICW. Jakarta: ICW.

Nugroho, R. (2017). Reformasi Birokrasi
dan Pelayanan Publik di Indonesia.
Jakarta: Pustaka Pelajar.